E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 5942-5955
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Strategi Pengelolaan Sampah di Lingkungan Kota Teluk Kuantan

Hardi Fridessoni[1], Seno Andri[2], Lie Othman[3]
[1,2,3] Universitas Riau
Email : hardifridessoni01@gmail.com, seno.andri@lecturer.unri.ac.id, lie.othman@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Pengelolaan sampah merupakan urusan wajib pemerintah daerah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Di Kota Teluk Kuantan, timbulan sampah Kabupaten Kuantan Singingi naik dari 139,18 ton/hari (2022) menjadi 144,23 ton/hari (2024), sementara pelayanan masih bertumpu pada pola kumpul–angkut–buang, sarana operasional terbatas, dan pemilahan dari sumber belum terbentuk. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Teluk Kuantan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data dihimpun melalui wawancara dengan informan kunci dari DLH, pemerintah wilayah, dan tokoh masyarakat, observasi, serta studi dokumentasi, lalu dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Teori strategi Michael E. Porter menjadi landasan utama, sedangkan kriteria evaluasi strategi Richard Rumelt (konsistensi, kesesuaian, kelayakan, dan keunggulan) digunakan sebagai alat analisis pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi DLH telah mencakup edukasi 3R, pengaturan pengangkutan, pembinaan bank sampah, serta koordinasi dengan pemerintah wilayah dan masyarakat, tetapi pelaksanaannya belum optimal. Konsistensi tampak pada kesamaan arah pimpinan dan pelaksana teknis, namun keterpaduan operasional perlu diperkuat. Kesesuaian terlihat pada perhatian terhadap kebutuhan kawasan dan penanganan keluhan, meski respons antisipatif masih terbatas. Kelayakan terkendala keterbatasan armada, tenaga operasional, dan fasilitas yang belum berfungsi. Keunggulan masih berupa potensi dari jejaring masyarakat, bank sampah, dan sektor informal. Faktor pendukung meliputi komitmen pimpinan, kelembagaan teknis, pendataan dan pelaporan, koordinasi pemerintah wilayah, dan keterlibatan sebagian masyarakat; faktor penghambat meliputi keterbatasan kapasitas operasional, perilaku membuang sampah sembarangan, rendahnya pemilahan dari sumber, dan beban sampah kawasan perdagangan.

Kata Kunci: strategi pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup, evaluasi strategi, Rumelt,

Teluk Kuantan

Abstract

Waste management is a mandatory function of local government in creating a clean, healthy, and sustainable environment. In Teluk Kuantan, daily waste generation in Kuantan Singingi Regency rose from 139.18 tonnes (2022) to 144.23 tonnes (2024), while services still rely on a collect–transport–dispose pattern, limited operational facilities, and little source separation. This study analyses the waste management strategy of the Environmental Agency (DLH) of Kuantan Singingi Regency in Teluk Kuantan and identifies its supporting and inhibiting factors. A qualitative descriptive-analytical design was used. Data were collected through interviews with key informants from the agency, local government, and community leaders, observation, and document review, and analysed with the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. Porter's strategy theory serves as the main framework, supported by Rumelt's strategy evaluation criteria: consistency, consonance, feasibility, and advantage. The findings show that the strategy covers 3R education, transport scheduling, waste bank development, and coordination with local government units and communities, but implementation is not yet optimal. Consistency is evident in the shared direction of leaders and technical staff, though operational integration needs strengthening. Consonance appears in attention to local needs and complaint handling, while anticipatory responses remain limited. Feasibility is constrained by limited vehicles, personnel, and inactive facilities. Advantage remains a potential arising from community networks, waste banks, and the informal sector. Supporting factors include leadership commitment, technical institutions, data reporting, area-level coordination, and partial community involvement; inhibiting factors include limited operational capacity, littering, weak source separation, and commercial-area waste loads.

Keywords: *waste management strategy, Environmental Agency, strategy evaluation, Rumelt, Teluk Kuantan*

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah di Kota Teluk Kuantan, ibu kota Kabupaten Kuantan Singingi, masih didominasi pola kumpul–angkut–buang, sementara pemilahan dan pengurangan sampah dari sumber belum berjalan efektif (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, 2024). Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) mencatat timbulan sampah harian kabupaten naik dari 139,18 ton pada 2022

menjadi 140,71 ton pada 2023 dan 144,23 ton pada 2024, atau tumbuh rata-rata sekitar 2,5% per tahun (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024). Kenaikan ini dipicu pertumbuhan penduduk, aktivitas pasar, perubahan pola konsumsi, serta *event* budaya tahunan Pacu Jalur yang menyisakan sampah plastik dalam jumlah besar.

Peningkatan beban tersebut tidak diimbangi kapasitas penanganan. Rasio tempat penampungan sementara (TPS) terhadap jumlah penduduk turun dari 10,24 pada 2020 menjadi 9,37 pada 2024; dari 15 kecamatan hanya tersedia 28 unit TPS, dan tempat pemrosesan akhir (TPA) masih dioperasikan secara *open dumping* (Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, 2025). Partisipasi warga dalam pemilahan baru sekitar 30%, dan pembuangan sampah ke Sungai Kuantan masih sering terjadi (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, 2024). Hambatan lain berupa terbatasnya anggaran operasional, belum optimalnya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dinas PU dan Satpol PP, serta belum adanya skema kontinjensi saat terjadi lonjakan sampah (Sulistiyani & Rosidah, 2021; Saputra, 2023).

Kondisi ini belum sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Regulasi tersebut mewajibkan peralihan dari penanganan *end-of-pipe* menuju pengelolaan terintegrasi melalui pemilahan lima jenis sampah, penyediaan TPS dan TPS 3R, pengoperasian TPA dengan metode *controlled* atau *sanitary landfill*, retribusi progresif, dan pelibatan masyarakat (Republik Indonesia, 2012). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, persampahan merupakan urusan pemerintahan konkuren wajib bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah, sehingga kegagalan merumuskan dan menjalankan strategi berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik (Republik Indonesia, 2014; Astuti & Maknun, 2025).

Secara normatif, Kabupaten Kuantan Singingi sebenarnya memiliki landasan perencanaan yang memadai. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang RTRW 2024–2044 menetapkan jaringan persampahan (SPA, TPS3R, TPS, TPA, dan TPST) di sejumlah kecamatan, termasuk Kuantan Tengah, dan RPJMD 2025–2029 menempatkan persampahan dalam program prioritas daerah. Namun, pengaturan normatif belum

menjamin efektivitas pelaksanaan, sehingga strategi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai pelaksana teknis perlu dianalisis.

Penelitian terdahulu tentang strategi pengelolaan sampah daerah umumnya menelaah satu unsur secara parsial, seperti strategi DLH berbasis analisis SWOT (Astuti & Maknun, 2025), pemetaan variabel kunci melalui MICMAC (Nurhidayat & Mappasomba, 2025), peran bank sampah dan partisipasi masyarakat (Asteria & Heruman, 2016), penyediaan TPS3R (Maheswari, 2024), atau kolaborasi lintas sektor (Fitriani & Suwitri, 2020). Studi implementasi strategi DLH di Sukoharjo dan Kota Serang juga menemukan kendala serupa, yaitu kesadaran masyarakat, keterbatasan armada, dan anggaran (Novitasari & Nurharjadmo, 2023; Mubarakh *et al.*, 2020). Kajian yang menilai strategi secara utuh di kota kecil semi-perkotaan, dengan tekanan khas berupa *event* budaya berskala nasional, masih terbatas.

Penelitian ini menggunakan teori strategi Porter sebagai landasan utama. Porter (1996) memandang strategi sebagai penciptaan posisi yang unik dan bernilai melalui seperangkat aktivitas yang dipilih secara sengaja dan saling melengkapi sehingga membentuk sistem yang koheren. Kerangka strategi yang utuh perlu menjelaskan empat hal: interaksi organisasi dengan lingkungan eksternal, koordinasi respons terhadap dinamika eksternal, dorongan terhadap inovasi dan kreativitas, serta peran faktor ketidakpastian (Porter, dalam Nurhidayat & Mappasomba, 2025). Dalam penelitian ini, strategi pengelolaan sampah dimaknai sebagai pilihan prioritas dan keterpaduan aktivitas DLH dalam memanfaatkan sumber daya untuk mengurangi serta menangani sampah. Turner dan Powell (1991) menambahkan bahwa strategi persampahan yang efektif harus holistik, memadukan minimisasi, daur ulang, pengangkutan, dan pemrosesan akhir, serta mewaspadai kegagalan informasi dan kegagalan institusional.

Untuk menilai mutu strategi, penelitian ini menggunakan empat kriteria evaluasi Rumelt (1980), yaitu konsistensi, kesesuaian, kelayakan, dan keunggulan. Kebaruan penelitian terletak pada perpaduan kedua kerangka tersebut untuk menilai strategi DLH di Kota Teluk Kuantan secara menyeluruh. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan (1) menganalisis strategi pengelolaan sampah yang dijalankan DLH Kabupaten

Kuantan Singingi di Kota Teluk Kuantan, dan (2) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis karena strategi DLH melibatkan konteks sosial, organisasi, dan kebijakan yang tidak dapat dipahami hanya melalui angka. Penelitian dilaksanakan di Kota Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai ibu kota kabupaten dan pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, dan budaya, dengan lokasi pengumpulan data meliputi kantor DLH Kabupaten Kuantan Singingi, kawasan permukiman dan fasilitas umum, TPS dan TPA, serta titik-titik pelaksanaan program kebersihan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi visual, sedangkan data sekunder berasal dari Renstra DLH 2025–2029, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DLH 2025, peraturan daerah, data SIPSN, data armada dan TPS, serta publikasi ilmiah. Informan dipilih secara purposive berdasarkan relevansi peran dan pengetahuannya, yaitu Kepala DLH, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan, dan Limbah B3 (PSPLB3), serta staf teknis Bidang PSPLB3 dari Dinas Lingkungan Hidup; Camat Kuantan Tengah dan Lurah Pasar dari pemerintah wilayah; serta tokoh masyarakat yang terdiri dari pedagang dan ketua RT. Observasi diarahkan pada aktivitas pengumpulan dan pengangkutan, kondisi TPS, armada, dan TPA, interaksi petugas dengan masyarakat, serta kebersihan ruang publik. Data dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan yang berlangsung secara iteratif, dan keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode. Temuan dibaca dengan empat isu strategi Porter, lalu dinilai dengan kriteria evaluasi strategi Rumelt (1980) yang diadaptasi ke konteks pelayanan publik, yaitu konsistensi untuk melihat keselarasan tujuan dan kebijakan dalam pengurangan sampah melalui edukasi, pengumpulan, dan pengangkutan; kesesuaian untuk menilai respons strategi terhadap kebutuhan kawasan, perdagangan, dan lonjakan sampah Pacu Jalur; kelayakan untuk menilai kecukupan anggaran, petugas, armada, dan fasilitas; serta keunggulan untuk melihat kemampuan

menciptakan layanan yang lebih teratur, efisien, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja pengelolaan sampah DLH pada 2025 belum mencapai target. Persentase sampah tertangani hanya 44,42% dari target 70%, turun 8,44 poin dari 52,86% pada 2024, meski masih di atas rata-rata nasional 34,95%. Pengurangan sampah melalui 3R baru 15,06% dari target 30%. Layanan langsung DLH juga baru menjangkau 9 dari 15 kecamatan (Tabel 3).

Tabel 1. Target dan Realisasi Kinerja DLH Tahun 2025

Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,51	73,96	96,67
Sampah yang tertangani	70,00	44,42	63,46
Sampah berkurang melalui 3R	30,00	15,06	50,20
Capaian retribusi persampahan	100,00	87,77	87,77

Sumber: LKIP DLH Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Analisis Strategi Berdasarkan Teori Porter

Interaksi dengan lingkungan eksternal. DLH merespons lingkungan eksternal melalui pendekatan "terpadu dari hulu hingga hilir": edukasi dan sosialisasi 3R kepada masyarakat, serta peningkatan pelayanan berupa penyediaan tempat sampah, armada, dan optimalisasi pengangkutan ke TPA (wawancara Kepala DLH, 2 Juli 2026). Arah ini sejalan dengan Porter yang menuntut strategi responsif terhadap perilaku masyarakat sebagai penghasil sampah, dan dengan PP 81/2012 yang menggeser paradigma kumpul–angkut–buang menuju pengurangan di sumber. Namun, interaksi tersebut sesuai pada tataran program, belum pada tataran hasil. Realisasi IKLH turun dari 70,71 (2022) menjadi 68,82 (2024), dan sosialisasi masih bersifat normatif *top-down* tanpa pendekatan kultural maupun pelibatan pelaku usaha sebagaimana diamanatkan Pasal 12 dan Pasal 35 PP 81/2012. Pada aspek teknologi, dokumen verifikasi mencatat TPA telah menggunakan metode *controlled landfill*, tetapi rumah kompos tidak aktif, jembatan timbang belum beroperasi karena belum ada listrik, dan genset rusak.

Koordinasi respons terhadap dinamika eksternal. Koordinasi DLH dengan kecamatan, kelurahan, dan RT/RW berjalan sebagai mekanisme rutin. Camat Kuantan

Tengah menyebut perannya sebagai "koordinator dan fasilitator" yang menghubungkan DLH dengan pemerintah desa, kelurahan, RT/RW, dan warga. Praktik ini sejalan dengan prinsip *New Public Service* yang menempatkan masyarakat sebagai mitra (Denhardt & Denhardt, 2021) dan temuan Putra dan Sihombing (2025) di Karimun. Meski demikian, koordinasi masih reaktif terhadap kondisi harian. Belum ada skema darurat untuk lonjakan sampah musiman seperti Pacu Jalur, dan penurunan sampah tertangani pada 2025 menunjukkan bahwa keberhasilan tahun sebelumnya tidak otomatis bertahan tanpa keputusan yang dinamis, sebagaimana ditekankan Porter.

Dorongan terhadap inovasi dan kreativitas. Inovasi DLH berbentuk pemberdayaan sosial, yaitu pembinaan bank sampah, kelompok swadaya masyarakat, serta kerja sama dengan sekolah dan pelaku usaha (wawancara Kepala Bidang PSPLB3, 2 Juli 2026). Langkah ini sesuai dengan gagasan Porter tentang penciptaan nilai baru dan temuan Saramuke *et al.* (2025) bahwa inovasi berbasis masyarakat dapat menjadi titik awal di tingkat lokal. Namun, capaian 3R berfluktuasi dan cenderung menurun (Tabel 4), dan sejumlah TPS 3R di Kuantan Tengah tercatat tidak aktif. Inovasi juga belum menyentuh dimensi teknis-proses seperti *refuse derived fuel (RDF)*, *waste-to-energy*, atau sistem informasi digital untuk pemantauan timbulan dan pengangkutan.

Tabel 2. Realisasi Pengurangan Sampah melalui 3R, 2021–2025

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	24,00	5,19	21,63
2022	26,00	25,99	99,96
2023	27,00	18,07	66,93
2024	28,00	18,20	65,00
2025	30,00	15,06	50,20

Sumber: DLH Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Peran faktor ketidakpastian. Informan mengakui adanya faktor yang sulit dikendalikan, yaitu volume sampah yang terus naik, keterbatasan armada dan tenaga, serta kesadaran sebagian warga yang rendah. Pengakuan ini sejalan dengan Porter, tetapi belum diikuti skema kontinjensi; lonjakan volume disikapi secara reaktif dengan menambah pelayanan rutin. Organisasi yang tangguh menghadapi ketidakpastian perlu mampu mengindra, menangkap peluang, dan mengonfigurasi ulang sumber daya

(Teece, 2018). Instrumen fiskal adaptif berupa retribusi progresif berbasis jenis dan volume sampah (Pasal 29 PP 81/2012) juga belum diterapkan secara konsisten (Putri & Wijaya, 2022).

Evaluasi Strategi Berdasarkan Kriteria Rumelt

Konsistensi. Pimpinan DLH dan Bidang PSPLB3 menyampaikan arah yang sama: pengurangan sampah dari sumber melalui 3R, pemilahan, dan bank sampah, didukung pelayanan pengangkutan. Kesamaan arah ini menjadi dasar keterpaduan aktivitas. Namun, konsistensi operasional belum terbukti. Tokoh masyarakat masih menemukan pembuangan sampah sembarangan, rendahnya pemilahan, dan kurangnya tempat sampah, sementara capaian 3R hanya 50,20% dari target. Ajakan memilah belum didukung fasilitas pemilahan dan pengangkutan yang menjaga sampah tetap terpilah.

Kesesuaian. DLH telah mengenali karakter kawasan. Lurah Pasar menjelaskan bahwa kawasan perdagangan menghasilkan sampah organik dan kemasan dalam jumlah besar, sehingga kelurahan terus berkoordinasi dengan DLH agar pengangkutan berjalan lancar. Camat juga menyediakan saluran penanganan keluhan. Kesesuaian ini masih berupa respons setelah masalah muncul; informasi tentang waktu aktivitas perdagangan, lokasi timbulan, dan pola kebutuhan pengangkutan belum digunakan untuk merencanakan pelayanan sebelum terjadi penumpukan.

Kelayakan. DLH mengatur jadwal armada dan penempatan personel sesuai kebutuhan wilayah, tetapi kapasitasnya terbatas. Renstra DLH 2025–2029 mencatat 4 dari 13 truk sampah (30,77%) dan 2 dari 11 kendaraan roda tiga (18,18%) rusak berat. Di TPA, rumah kompos tidak aktif, jembatan timbang belum beroperasi, dan genset rusak (Tabel 5). Dengan kondisi tersebut, kelayakan strategi belum terpenuhi secara menyeluruh dan memerlukan penyesuaian target dengan kemampuan sumber daya.

Tabel 3 Kondisi Armada dan Fasilitas Pendukung DLH

Sarana	Jumlah	Kondisi
Truk pengangkut sampah	13 unit	9 baik, 4 rusak berat
Pick up pengangkut sampah	3 unit	3 baik
Kendaraan roda tiga	11 unit	9 baik, 2 rusak berat
Alat berat	4 unit	2 baik, 2 rusak berat
Rumah kompos TPA	1 unit	Tidak aktif

Sarana	Jumlah	Kondisi
Jembatan timbang TPA	1 set	Belum beroperasi (belum ada listrik)
Genset TPA	1 unit	Rusak

Sumber: Renstra DLH 2025–2029; hasil verifikasi DLH, 2025

Keunggulan. Potensi keunggulan terletak pada jejaring bank sampah, kelompok swadaya, sekolah, pelaku usaha, dan sektor informal. Sektor informal di tingkat kabupaten mengelola sekitar 11,86 ton sampah anorganik per hari. Tokoh masyarakat menilai DLH "sudah berupaya melaksanakan pengelolaan sampah dengan cukup baik" melalui pengangkutan dan sosialisasi. Akan tetapi, keberadaan program belum otomatis menjadi keunggulan. Kontribusi sektor informal belum terhubung dalam kemitraan formal dengan DLH, dan manfaat berkelanjutan bank sampah belum dapat dipastikan. Ringkasan evaluasi disajikan pada Tabel 6.

Tabel 4 Ringkasan Evaluasi Strategi DLH Berdasarkan Kriteria Rumelt

Kriteria	Sudah terpenuhi	Kesenjangan
Konsistensi	Arah pimpinan dan pelaksana teknis selaras pada 3R, pemilahan, dan bank sampah	Edukasi belum terhubung dengan fasilitas pemilahan dan pengangkutan terpilah
Kesesuaian	Kebutuhan kawasan perdagangan dikenali; ada saluran keluhan	Respons masih reaktif; belum ada skema antisipatif dan skema Pacu Jalur
Kelayakan	Ada pengaturan jadwal armada dan personel	Armada rusak, tenaga terbatas, sebagian fasilitas TPA tidak berfungsi
Keunggulan	Jejaring bank sampah, masyarakat, dan sektor informal	Manfaat berkelanjutan dan kemitraan formal belum terbukti

Sumber: Olahan penulis, 2026

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung dan penghambat implementasi strategi dipetakan menjadi faktor internal dan eksternal, sebagaimana lazim dalam kajian strategi organisasi publik (Saputra, 2023; Astuti & Maknun, 2025). Hasil pemetaan disajikan pada Tabel 7.

Tabel 5 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Strategi

Faktor	Pendukung	Penghambat
Internal	Komitmen pimpinan dengan arah terpadu hulu–hilir; Bidang PSPLB3 sebagai unit teknis dengan pembagian tugas jelas; pendataan, pemantauan, dan pelaporan lapangan	Keterbatasan armada layak operasi; keterbatasan tenaga operasional; sistem informasi yang belum terintegrasi
Eksternal	Koordinasi kecamatan, kelurahan, dan RT/RW; dukungan tokoh masyarakat; kesediaan sebagian warga mengikuti gotong royong dan jadwal pengangkutan	Pembuangan sampah sembarangan; belum terbentuknya pemilahan dari sumber; tingginya sampah organik dan kemasan dari kawasan perdagangan

Sumber: Olahan penulis, 2026

Faktor pendukung internal menjadi modal organisasi apabila arahan pimpinan diterjemahkan unit teknis dan diperbaiki berdasarkan data lapangan. Hambatan internal yang paling kuat didukung data adalah keterbatasan armada dan tenaga, yang menciptakan jarak antara arah strategi dan kapasitas pelaksanaan. Di sisi eksternal, perilaku warga berada di luar kendali langsung DLH, tetapi dapat dipengaruhi melalui edukasi, pengawasan, kemudahan akses fasilitas, dan penegakan aturan. Aktivitas perdagangan bukan hambatan dengan sendirinya; hambatan muncul ketika kebutuhan pengangkutannya tidak diimbangi pengaturan pelayanan dan tanggung jawab pedagang.

Temuan ini menguatkan penelitian sebelumnya yang menempatkan kesadaran masyarakat, armada, dan anggaran sebagai kendala utama strategi DLH (Mubarakh *et al.*, 2020; Novitasari & Nurharjadmo, 2023). Kontribusi penelitian ini adalah menunjukkan bahwa di kota kecil semi-perkotaan, kesenjangan terbesar terletak pada kelayakan dan sifat respons yang reaktif, sehingga penguatan strategi perlu dimulai dari kapasitas operasional dan perencanaan antisipatif, bukan hanya perluasan sosialisasi.

KESIMPULAN

Strategi pengelolaan sampah DLH Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Teluk Kuantan telah mencakup edukasi 3R, pengaturan pengangkutan dan penempatan petugas, pembinaan bank sampah, serta koordinasi dengan kecamatan, kelurahan, dan

masyarakat, tetapi pelaksanaannya belum optimal. Dalam kerangka Porter, interaksi dengan lingkungan eksternal dan koordinasi kelembagaan sudah terbangun, namun respons masih reaktif, inovasi masih terbatas pada aspek sosial, dan belum ada skema kontinjensi untuk ketidakpastian seperti lonjakan sampah saat Pacu Jalur. Berdasarkan kriteria Rumelt, konsistensi tampak pada kesamaan arah pimpinan dan pelaksana teknis, kesesuaian tampak pada perhatian terhadap kawasan perdagangan dan penanganan keluhan, kelayakan terkendala armada, tenaga, dan fasilitas yang tidak berfungsi, sedangkan keunggulan masih berupa potensi dari bank sampah, jejaring masyarakat, dan sektor informal.

Faktor pendukung internal meliputi komitmen pimpinan, kelembagaan Bidang PSPLB3, serta pendataan dan pelaporan lapangan; faktor pendukung eksternal meliputi koordinasi pemerintah wilayah, dukungan tokoh masyarakat, dan keterlibatan sebagian warga. Faktor penghambat internal terutama keterbatasan armada layak operasi dan tenaga operasional, sedangkan faktor penghambat eksternal meliputi pembuangan sampah sembarangan, rendahnya pemilahan dari sumber, dan beban sampah kawasan perdagangan.

Penelitian ini merekomendasikan empat langkah. Pertama, DLH memprioritaskan pemutakhiran data dan perbaikan armada, penempatan petugas berbasis beban kerja, serta jadwal dan rute pengangkutan berdasarkan karakter kawasan, termasuk skema penanganan *event* besar. Kedua, edukasi pemilahan dihubungkan dengan layanan yang jelas (jenis pilahan, lokasi penyerahan, jadwal, dan penyaluran ke bank sampah), disertai pengaktifan kembali TPS 3R dan rumah kompos. Ketiga, pemerintah kabupaten memberikan dukungan anggaran berbasis kebutuhan terverifikasi, terutama pemeliharaan armada dan pemulihan fasilitas. Keempat, pemerintah wilayah, pedagang, warga, dan sektor informal memperkuat pembagian peran melalui kerja sama yang tercatat. Keterbatasan penelitian ini adalah sebagian data kinerja tersedia pada tingkat kabupaten, sehingga penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data pelayanan yang khusus mencakup Kota Teluk Kuantan.

DAFTAR PUSTAKA

Asteria, D., & Heruman, H. (2016). Bank sampah sebagai alternatif strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Tasikmalaya. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 23(1), 136–141.

Astuti, R. D., & Maknun, L. (2025). Penentuan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dengan metode SWOT (studi kasus: Bangunjiwo Kasihan Bantul, DIY). *Rekayasa*, 18(1), 73–82. https://doi.org/10.21107/rekayasa.v18i1.28033

Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2021). *The new public service: Serving, not steering* (4th ed.). Routledge.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi. (2024). *Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi 2025–2029*. DLH Kabupaten Kuantan Singingi.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi. (2025). *Laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) tahun 2025*. DLH Kabupaten Kuantan Singingi.

Fitriani, D., & Suwitri, S. (2020). Kolaborasi dalam pengelolaan sampah antara Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat di Kabupaten Kendal. *Jurnal Public Policy and Management Review*, 9(3), 201–214.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). *Statistik lingkungan hidup Indonesia 2024*. KLHK.

Maheswari, I. A. (2024). Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah melalui penyediaan TPS3R di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Pelayanan Publik*, 11(1), 12–25.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Mubarakh, A., Yulianti, E., & Yusuf, M. (2020). Implementasi strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani sampah di Kota Serang. *Jurnal Governansi*, 6(2), 77–89.

Novitasari, D., & Nurharjadmo, W. (2023). Implementasi strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Wacana Publik*, 3(1), 50–63.

Nurhidayat, N., & Mappasomba, Z. (2025). Strategi pengelolaan sampah plastik berbasis partisipasi masyarakat dan teknologi di Kelurahan Samata dan Romang Polong, Kabupaten

Gowa. *Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat*, 25(2), 405–419.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. (2024). *Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024–2044*.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. (2025). *Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025–2029*.

Porter, M. E. (1996). What is strategy? *Harvard Business Review*, 74(6), 61–78.

Putra, A., & Sihombing, S. S. (2025). Strategi Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2(3), 74–83. https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Desentralisasi/article/view/780

Putri, R. A., & Wijaya, A. (2022). Challenges of urban waste management in decentralized Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 12(1), 45–60. https://doi.org/10.5296/jpag.v12i1.19234

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69.

Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Rumelt, R. P. (1980). The evaluation of business strategy. Dalam W. F. Glueck (Ed.), *Business policy and strategic management* (3rd ed.). McGraw-Hill.

Saputra, A. D. (2023). *Manajemen strategis dalam organisasi publik: Teori dan aplikasi kontemporer* (Edisi revisi). Rajawali Pers.

Saramuke, D. M. M., Rumahorbo, B. T., Manalu, J., Warpur, M., & Walukow, A. F. (2025). Strategi pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat di Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua. *Portal Sipil*, 14(1), 1–12. https://doi.org/10.58839/jps.v14i1.1519

Sulistiyani, A. T., & Rosidah. (2021). *Manajemen sumber daya manusia dalam konteks pemerintahan daerah*. Graha Ilmu.

Teece, D. J. (2018). Dynamic capabilities as (workable) management systems theory. *Journal of Management & Organization*, 24(3), 359–368.

Turner, R. K., & Powell, J. (1991). Towards an integrated waste management strategy. *Environmental Management and Health*, 2(1).